

BAB I

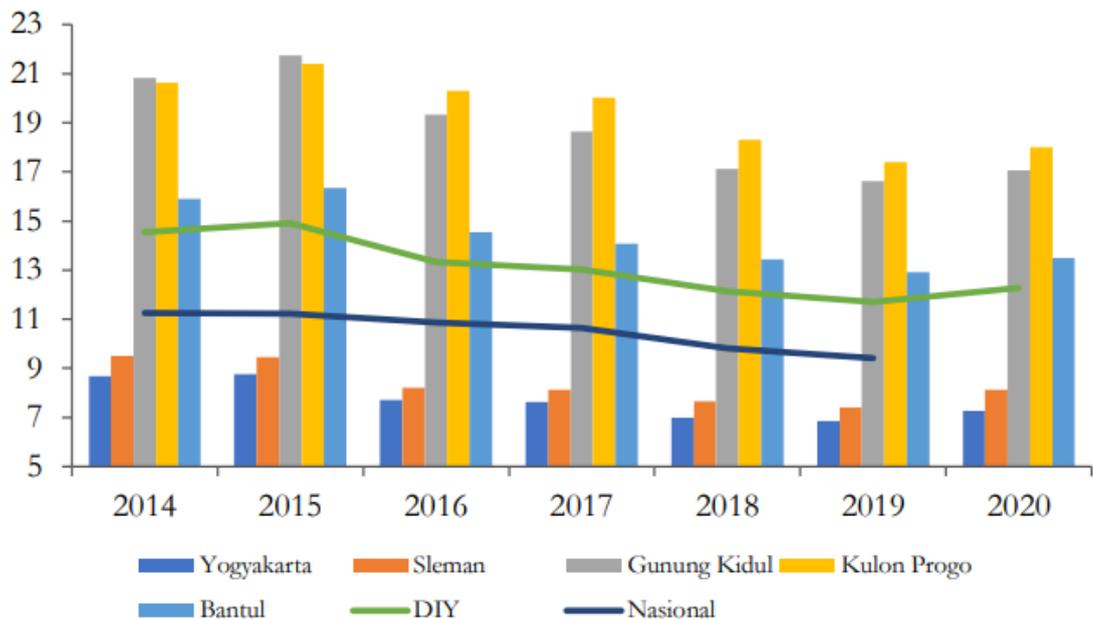
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan suatu isu yang tidak pernah lepas dari suatu wilayah. Berbagai macam kebijakan dikerahkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dikarenakan kemiskinan yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan di suatu wilayah. Menurut Badan Statistik (2021), kemiskinan muncul dikarenakan ketidakmampuan ekonomi di mana masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya (*basic needs approach*). Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut akan menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia. Turunnya kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh turunnya produktivitas dan penurunan upah yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan nasional suatu wilayah (Astuti & Lestari, 2018). Maka dari itu pengentasan kemiskinan merupakan isu yang harus mendapatkan perhatian serius.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki isu kemiskinan yang cukup tinggi yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan tingkat kemiskinan kota/kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan provinsi maupun tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga tercatat terus-menerus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa (BPS DIY, 2020). Berdasarkan Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY (2019) menjelaskan bahwa kemiskinan di DIY disebabkan oleh rendahnya investasi pada industri padat karya,

konsumsi listrik yang belum merata, serta belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi.



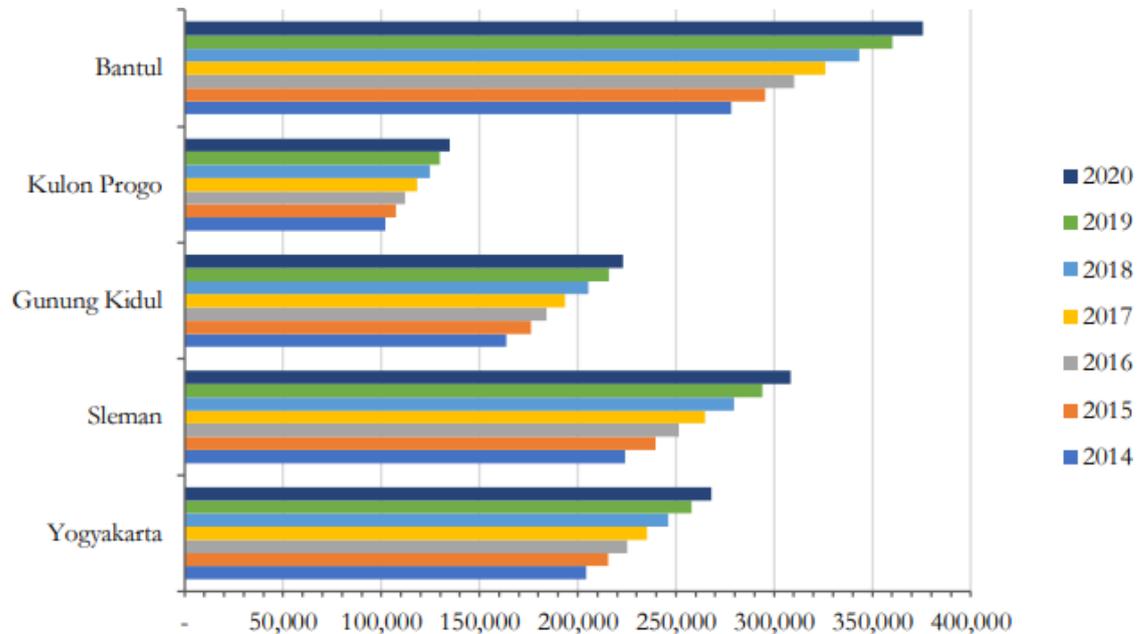
GAMBAR 1.1
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY
Sumber: Bappeda DIY

Berdasarkan Gambar 1.1, angka kemiskinan beberapa kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan provinsi maupun nasional. Selain itu, seperti yang dilansir oleh BPS DIY (2020) bahwa tingkat kemiskinan kabupaten yang berada di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kulon Progo dan Gunung Kidul cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten di wilayah utara, yaitu Sleman dan Yogyakarta. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut perlu dilakukan upaya untuk mencari determinan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat memiliki pedoman dalam mengentaskan kemiskinan.

Gambar 1.1 menunjukkan secara umum tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019, tetapi tidak pada tahun 2020 yang justru mengalami peningkatan. Adanya fakta tersebut bermakna bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta rupanya memiliki dampak yang positif. Walaupun begitu, dapat dilihat bahwa antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup jelas. Tingkat kemiskinan tertinggi di DIY ditemukan di Kabupaten Kulon Progo dan selanjutnya di Kabupaten Gunung Kidul, hal ini sesuai dengan keadaan geografis yang umumnya didominasi sektor pertanian dengan penghasilan yang rendah sehingga masyarakat tidak dapat meraih standar kebutuhan hidup. Hal di atas berlawanan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang memegang tingkat kemiskinan terendah di DIY dikarenakan berada di wilayah perkotaan yang mana ketersediaan dan kemudahan akses infrastruktur membantu dalam kegiatan maupun kebutuhan hidup masyarakat (Suryandari, 2018).

Kemiskinan berkaitan erat dengan infrastruktur yang mana pembangunan infrastruktur listrik ditujukan untuk mempermudah mobilitas baik mobilitas manusia, barang maupun jasa, sehingga akan berdampak langsung dalam penurunan tingkat kemiskinan (S. D. Purnomo et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Sumardjoko & Akhmadi (2019) menunjukkan bahwa ketersediaan suatu wilayah akan infrastruktur terutama infrastruktur konektivitas yang layak akan memberikan kemudahan akses dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik

perdagangan maupun distribusi barang dan jasa yang seterusnya akan membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak.



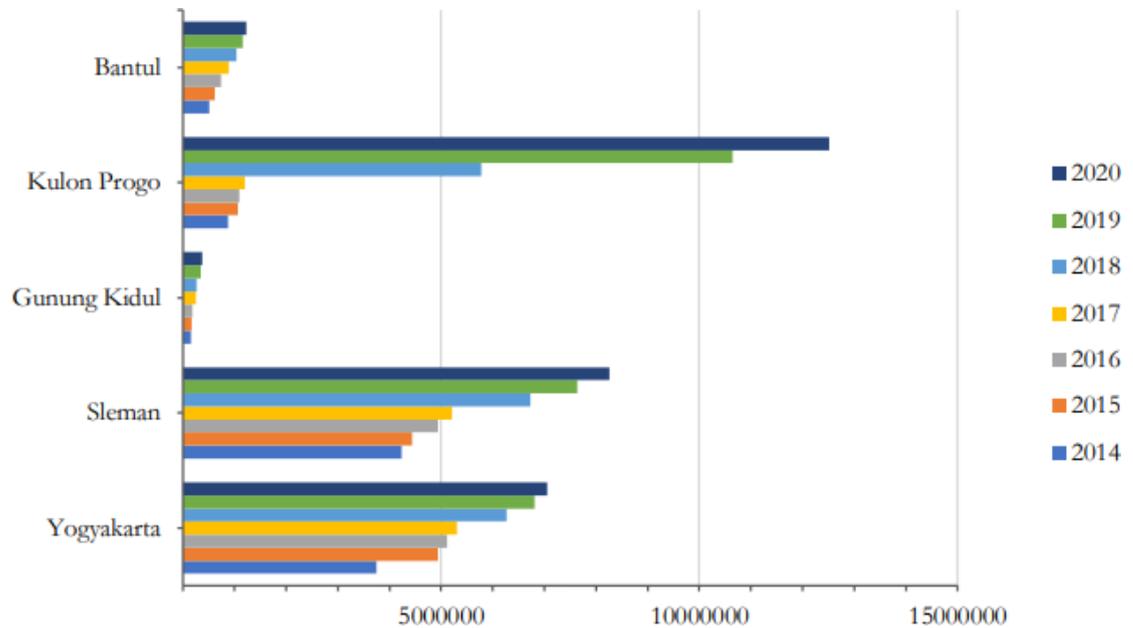
GAMBAR 1.2
Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten/Kota Provinsi DIY

Pada Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan pelanggan listrik di kota/kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara umum selalu meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Berdasarkan pertumbuhannya, pada tahun 2015 terjadi peningkatan pelanggan listrik sebesar 6,34% dibandingkan dengan tahun 2014, tetapi pada tahun 2016 pertumbuhan pelanggan listrik menurun menjadi 4,75%. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan pelanggan listrik hingga tahun 2018 yaitu sebesar 5,36%, dan pertumbuhan pelanggan listrik pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dengan tingkat pelanggan listrik sebesar 4,97%. Walaupun pertumbuhan pelanggan listrik di Daerah Istimewa

Yogyakarta cenderung berfluktuasi, tetapi jika dilihat dari tren jumlah pelanggan listrik selalu meningkat tiap tahunnya.

Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa peningkatan jumlah pelanggan listrik menunjukkan bahwa listrik semakin menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat dalam menunjang kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonominya yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya akan membantu mengurangi kemiskinan (Sumardjoko & Akhmadi, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Priyarsono (2012) menyebutkan bahwa infrastruktur listrik yang layak di suatu wilayah akan membantu kemampuan kerja ekonomi dan memangkas kemiskinan wilayah.

Beberapa faktor lainnya yang diketahui membantu dalam pengentasan kemiskinan adalah faktor besarnya penanaman modal yang masuk di suatu daerah (Rarun et al., 2018). Sukirno yang dikutip pada (Minggu et al., 2019) menyatakan bahwa ketika investasi masuk ke suatu daerah maka akan menyebabkan terbukanya kesempatan kerja baru yang kelak akan membantu mendorong pendapatan masyarakat sehingga membaiknya pendapatan penduduk miskin akan mengurangi tingkat kemiskinan.



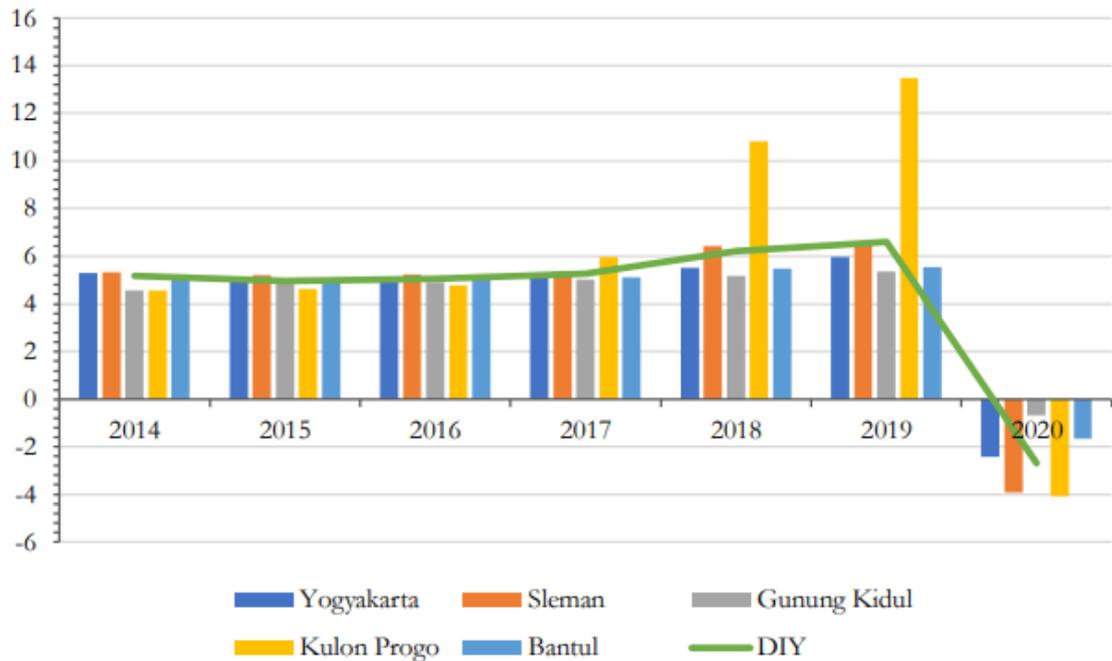
GAMBAR 1.3
Realisasi Investasi di Kabupaten/Kota Provinsi DIY

Perkembangan investasi dengan arah yang terus positif ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode pengamatan. Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi investasi kota/kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peningkatan yang signifikan. Investasi yang tinggi dipimpin oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang mana merupakan wilayah yang memiliki daya tarik wisata cukup tinggi sehingga berpengaruh pada penanaman modal di wilayah tersebut. Kabupaten Kulon Progo juga mengalami peningkatan yang tinggi dikarenakan banyaknya investor yang masuk akibat pembangunan infrastruktur bandara di wilayah tersebut, sedangkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul juga mengalami peningkatan tetapi lebih rendah dibanding wilayah lainnya.

Secara umum realisasi investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi kenaikan yang signifikan, yakni pada tahun 2018 realisasi investasi tumbuh

sebesar 56,18% dibanding tahun sebelumnya dan peningkatan tersebut juga terus terjadi hingga tahun 2019 pertumbuhannya menjadi sebesar 32,47% dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 realisasi investasi meningkat 10,62% dibandingkan tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa dalam kurun waktu enam tahun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapati kenaikan investasi yang sangat tinggi. Adanya pertumbuhan investasi yang pesat diharapkan dengan menyertakan pengurangan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dientaskan dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Safuridar (2017), mengemukakan tumbuhnya laju pertumbuhan ekonomi akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi masyarakat yang menganggur dan akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berasal dari aktivitas perekonomian dalam periode tertentu yang mana sumber-sumber dari pertumbuhan ekonomi akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan hal tersebut membantu menurunkan angka kemiskinan (Astuti & Lestari, 2018).



GAMBAR 1.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY

Laju pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode pengamatan diketahui berfluktuasi. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,17% yang mana pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 4,95% dikarenakan adanya tekanan penurunan kondisi perekonomian secara global. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan tahun berikutnya terus berkembang ke arah positif setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,59 persen. Gambar 1.4 juga menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki tren laju pertumbuhan ekonomi yang cukup sama, kecuali Kabupaten Kulon Progo yang pertumbuhan ekonominya melambung tinggi dibanding beberapa kabupaten/kota di sekitarnya. Masalah yang muncul dari keadaan tersebut yakni tingkat kemiskinan masih tinggi walaupun memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik yang nyatanya

tidak diikuti oleh pengentasan kemiskinan. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sehingga akan membantu dalam penyediaan pembukaan kesempatan kerja dan akhirnya akan memberikan pengaruh pada penurunan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemiskinan akan dapat teratasi apabila pendapatan yang diterima masyarakat meningkat (Islami & Anis, 2019). Peningkatan pendapatan pekerja dapat dilakukan melalui kebijakan peningkatan upah minimum regional maupun kabupaten/kota. Kebijakan peningkatan upah minimum memiliki dampak memperbaiki kondisi ekonomi pada pekerja dengan upah yang rendah (Kurniawati et al., 2017). Meningkatnya upah minimum juga akan berdampak pada kenaikan penghasilan masyarakat maka akan diikuti dengan konsumsi dan kesejahteraan yang meningkat sehingga masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan (Giyanti Permata Dewi, 2015).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah konsumsi listrik berpengaruh terhadap kemiskinan di DIY?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan di DIY?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di DIY?
4. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di DIY. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk.

1. Menguji pengaruh konsumsi listrik terhadap kemiskinan di DIY.
2. Menguji pengaruh investasi terhadap kemiskinan di DIY
3. Menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di DIY
4. Menguji pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di DIY

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini bermanfaat untuk lebih menambah wawasan peneliti tentang kemiskinan dan faktor-faktornya seperti konsumsi listrik, investasi, pertumbuhan ekonomi serta upah minimum.
2. Dapat memberikan sumbangsih terhadap berbagai pihak yang membutuhkan, untuk penelitian berikutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas.
3. Sebagai media informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui pembahasan tentang kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Bagi Pemerintah, memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan dengan harapan dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk menurunkan tingkat kemiskinan